



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI  
NOMOR 49 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENELITIAN IAIN ANTASARI TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI,

Menimbang

- a. bahwa agar kegiatan penelitian pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan tertib, perlu menetapkan penelitian IAIN Antasari tahun 2014;
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam Penelitian dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penelitian IAIN Antasari Tahun 2014;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2014 tentang Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 777 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/63136/2014 tentang Rektor Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin Masa Jabatan 202013-2017;
10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor SP DIPA-025.04.2.424327/2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI TENTANG PENELITIAN IAIN ANTASARI TAHUN 2014
- KESATU Menetapkan Bantuan Penelitian IAIN Antasari Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA Penerima bantuan bertugas:
1. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Penelitian Kluster Pembinaan Peningkatan Kualitas, Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi, Penelitian Dasar Interdisipliner, Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi, Penelitian Terapan Dan Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi, Penelitian Pendampingan Komunitas, Pengabdian Berbasis Riset, Pengabdian Berbasis Program Studi, Penelitian dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan E-Book pada Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
  2. Menyusun dan menyampaikan laporan secara tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA Biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Antasari Tahun 2014.
- KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada bulan April sampai dengan Desember 2014, dengan ketentuan bahwa jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 22 Maret 2014



*(Signature)*  
**Prof. Dr. H. Akhmad Fauzi Aseri MA**  
**NIP. 195512231982031001**

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 ANTASARI NOMOR 63 TAHUN 2014  
 TANGGAL 15 FEBRUARI 2014  
 TENTANG PENELITIAN IAIN ANTASARI TAHUN 2014

No	Judul	Peneliti	Biaya
1	Integrasi Pendidikan Agama Islam Ke Dalam Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Di Mtsn Mulawarman Banjarmasin.	M. Ramli	Rp. 50.000 x 30 Jam
2	pengeluaran Keluarga (Family Expenditure) Untuk Pendidikan (Studi Pengeluaran Keluarga Untuk Biaya Pendidikan Di Iain Antasari).	1. Kamrani Buseri (Ketua) 2. Sofyan Noor (Anggota) 3. Juhaidi	Rp. 50.000 x 650 Jam
3	Evaluasi Sistem Pembelajaran Kitab Kuning Pada Program Magang Pesantren Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam.	1. Yusna Zaidah (Ketua) 2. Nadiyah Khalid (Anggota) 3. Lutfi Sahal (Anggota)	Rp. 50.000 x 550 Jam
4	Strategi Caleg Perempuan Terpilih Sebagai Anggota Dprd Kabupaten/ Kota Di Kalimantan Selatan Pemilu 2014.	1. Ridhahani Fizi (Ketua) 2. Wardah Hayati (Anggota) 3. Fatrawati Kumari (Anggota)	Rp. 50.000 x 450 Jam
5	PASUGIHAN ORANG BANJAR (Studi Identifikasi Prilaku Dan Amaliah Pasugihan Orang Banjar Di Kalsel)	1. Abdul Sani	Rp. 50.000 x 300 Jam
6	Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Dalam Dinamika Politik Kerajaan Banjar Abad XIX.	1. Ahma Suriadi	Rp. 50.000 x 250 Jam
7	Tantangan Kepala Madrasah Aliyah Dalam Mengembangkan Manajemen Pendidikan Ketrampilan di Kalimantan Swlatan	1. Suriagiri (Ketua) 2. Muhran Zuhri (Anggota) 3. Irfan Islami (Anggota)	Rp. 50.000 x 500 Jam
8	Tela'ah Kurikulum Aqidah Akhlak Madrasah Ibtidaiyah Pada Min Di Kota Banjarmasin.	1. Yahya (Ketua) 2. M.Noor Fuady (anggota) 3. Taufik Mubarak (Anggota)	Rp. 50.000 x 550 Jam
9	<u>Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pembiayaan murabahah di Perbankan Syariah.</u>	1. Sa'adah (Ketua) 2. Rusdiah (Anggota) 3. Zainal Muttaqin	Rp. 50.000 x 450 Jam
10	Konseling Behavior Dalam Menangani Mahasiswa Pasif (Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Studi Bimbingan Dan Konseling Islam Di Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Iain Antasari Banjarmasin)	1. Romdiah	Rp. 50.000 x 400 Jam
11	Peranan Khutbah Jumat Dalam Memperkuat Aqidah Umat: Mencermati Materi Khutbah Jumat Di Kota Banjarmasin.	1. Muhdi (Ketua) 2. Budiman (Anggota) 3. Moch. Arif (Anggota)	Rp. 50.000 x 700 Jam
12	Metode Istibath Hukum Ibn Rusyd Dalam Kitab Bidayah Al-Mujtahid.	Fathurrahman Azhari	Rp. 50.000 x 350 Jam
13	Manajemen Ketatausahaan Pada Madrasah Aliyah Normal Islam Rasyidiyah Khalidiyah (Rakha) Provinsi Kalimantan Selatan	1. Ahmad, Salabi (Ketua) 2. M. Yuseran (Anggota)	Rp. 50.000 x 400 Jam
14	Kajian Relevansi Kurikulum Terhadap Kompetensi Kerja Alumni Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah IAIN Antasari Banjarmasin.	1. Rusdiana Husaini (Ketua) 2. Musyarafah (Anggota)	Rp. 50.000 x 500 Jam
15	Sighat Ijab Kabul Transaksi Jual Beli: Perspektif Ulama Kalimantan Selatan (Analisis Praktik Bermazhab Di Kalimantan Selatan)	1. Rusdiah (Ketua) 2. Zainal Muttaqin (Anggota) 3. Sa'adah (Anggota)	Rp. 50.000 x 550 Jam
16	Tata Tertib Dan Pemberian Sanksi Edukatif Sebagai Alat Kontrol Perilaku Mahasiswa Iain Antasari Banjarmasin	1. Rusdiana Hamid	Rp. 50.000 x 350 Jam
17.	Language Learning Strategies Of EFL Learners In Learning English As A Foreign Language	1. Saifuddin AH. (Ketua) 2. Rusnadi (Anggota)	Rp. 50.000 x 700 Jam

17.	Language Learning Strategies Of EFL Learners In Learning English As A Foreign Language	1. Saifuddin AH. (Ketua) 2. Rusnadi (Anggota) 3. Maulidiyah (Anggota)	Rp. 50.000 x 700 Jam
18	Etos Kerja Dosen-Dosen Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora Iain Antasari Banjarmasin	1. Nurul Dzazimah	Rp. 50.000 x 300 Jam
19	Pelatihan Komunikasi Interpersonal Untuk Menurunkan Kecemasan Berkomunikasi Di Depan Umum Pada Mahasiswa Psikologi Islam.	1. Siti Faridah (Ketua) 2. Mulyani (Anggota) 3. Mubarak (Anggota)	Rp. 50.000 x 600 Jam

Ditetapkan di Banjarmasin

pada tanggal 15 Februari 2014

Rektor



**Prof. Dr. H. Akhmad Fauzi Aseri MA**

**NIP. 195512231982031001**

**TANTANGAN MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) PERCONTOHAN  
DALAM MENGEMBANGKAN PROGRAM PENDIDIKAN  
KETERAMPILAN BERORIENTASI MASYARAKAT  
DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



Oleh Tim Peneliti:  
Suriagiri  
Murhan Zuhri  
Irfan Islamy

Penelitian ini Dibiayai dari Dana DIPA  
UIN Antasari Banjarmasin  
Tahun 2014

**INSTITUS AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
MASYARAKAT BANJARMASIN  
2014**

# TANTANGAN MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) PERCONTOHAN DALAM MENGEMBANGKAN PRORAM PENDIDIKAN KETERAMPILAN BERORIENTASI MASYARAKAT DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sistem pendidikan di Indonesia dapat digambarkan mulai dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga pendidikan dasar terdapat dua jalur yaitu madrasah umum dan madrasah agama, sedangkan pada madrasah menengah sudah dibedakan menjadi tiga jalur, yaitu madrasah menengah umum (*general upper secondary school*), madrasah menengah keterampilan (*vocational upper secondary school*), dan Madrasah Aliyah (*islamic upper secondary school*)<sup>1</sup>. Demikian pula pada tingkat pendidikan tinggi, terdapat program umum, program agama, dan program diploma (keterampilan).

Dari konteks tersebut di atas, madrasah akan mengalami tantangan yang sangat berat, yakni masyarakat mulai terpengaruh dengan pandangan positivisme, materialisme, dan kapitalisme sehingga segala sesuatu yang tidak memberikan faedah, keuntungan, dan peluang akan ditinggalkan. Madrasah dianggap marginal, dan masyarakat memang cukup beralasan. Masyarakat menganggap madrasah tidak profesional, tidak berkualitas, (hasil UAN) di bawah rata-rata, *out put* tidak mampu berkompetisi dengan yang lain, dan bahkan dianggap manajemen madrasah amburadul (*common sense*).

Dalam Pengembangannya program pendidikan keterampilan, harus memperhatikan komponen-komponennya; (1) kajian terhadap hasil perencanaan sebelumnya; (2) rumusan tentang tujuan perencanaan pendidikan secara makro; (3) rumusan kebijakan atau posisi yang dapat dijabarkan; (4) pengembangan program dan proyek sebagai operasionalisasi berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan; (5) *schudelling*; (6) implementasi rencana<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Walters, D. (2014) The Relationship Between Post Secondary Education and Skill, Comparing Credencial Human Cavital Theory The Canadian Journal Higher Education 97-124

<sup>2</sup> Indar D. (2014) *Perencanaan Pendidikan Strategi dan Implementasinya*, Surabaya, Karya ditama, hal. 68

Penelitian ini difokuskan pada Madrasah Aliyah, dengan pertimbangan, *pertama*, dalam sistem permadrasah MAN 2 Amuntai, MAN 2 Barabai MAN 2 Banjarmasin memiliki keunggulan di bandingkan madrasah lainnya, madrasah dalam pembelajarannya diharapkan dapat menciptakan suasana keagamaan di lingkungannya, dengan memberikan pendidikan moral, nilai, dan akhlaq mulia, sehingga dapat menghantarkan peserta didik ke dalam kehidupan nyata yang Islami. *Kedua*, hanya 30 % yang dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, selebihnya lulusan akan memasuki dunia kerja (70%).. *Ketiga*, memiliki program pendidikan keterampilan dan dilengkapi dengan guru keterampilan serta sarana untuk praktek keterampilan (bengkel kerja, *workshop*). Program itu dirintis sejak tahun 1998 berdasarkan Piagam Kerjasama Departemen Agama dengan *United Nation Development Program* (UNDP) Nomor INS/85/036/A/01/13 tanggal 14 Desember 1998.

Dalam kajian pada penelitian ini adalah kajian “Tantangan MAN dalam mengembangkan Program Pendidikan Keterampilan” yang dikelola oleh kementerian Agama dengan merujuk Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor: 01/Dj.I/Dt.I./103/2016 Pedoman dan Pengembangan Program Pendidikan Keterampilan pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Seluruh Indonesia sebagai madrasah percontohan. Untuk itu pemerintah khususnya kementerian agama mengembangkan pendidikan dengan berbagai instrumen dan strategi, serta sistematis.

Dari latar belakang masalah tersebut penelitian ini mengambil judul “Tantangan MAN dalam mengembangkan Program Pendidikan Keterampilan Berbasis Masyarakat”

## **B. Fokus Masalah**

Mengacu pada latar belakang penelitian ini di atas, maka ditetapkan fokus masalah, yaitu: Bagaimana pengembangan program pendidikan keterampilan pada MAN percontohan di Kalimantan Selatan.

Berdasarkan fokus tersebut, berikut dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai batasan kajian penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana mengimplementasikan kurikulum program pendidikan keterampilan pada MAN percontohan di Kalimantan Selatan?

2. Bagaimana Sumber Daya Manusia dalam mengembangkan program pendidikan keterampilan pada MAN percontohan di Kalimantan Selatan?
3. Bagaimana Kebijakan Pemerintah dalam megembangkan program pendidikan keterampilan pada MAN percontohan di Kalimantan Selatan?
4. Bagaimana sikap dunia usaha dan dunia industri dalam mengembangkan program pendidikan keterampilan pada MAN percontohan di Kalimantan Selatan?

### **C. Tujuan**

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengembangan program pendidikan keterampilan pada MAN percontohan di Kalimantan Selatan. Adapun secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendiskripsikan implementasi kurikulum program pendidikan keterampilan pada MAN percontohan di Kalimantan Selatan
2. Mendiskripsikan Sumber Daya Manusia dalam mengembangkan program pendidikan keterampilan pada MAN percontohan di Kalimantan Selatan
3. Mendiskripsikan kebijakan pemerintah dalam mengembangkan program pendidikan keterampilan pada MAN percontohan di Kalimantan Selatan
4. Mendiskripsikan sikap masyarakat (dunia usaha dan dunia industry) dalam mengembangkan program pendidikan keterampilan pada MAN percontohan di Kalimantan Selatan

### **D. Siginifikansi Penelitian**

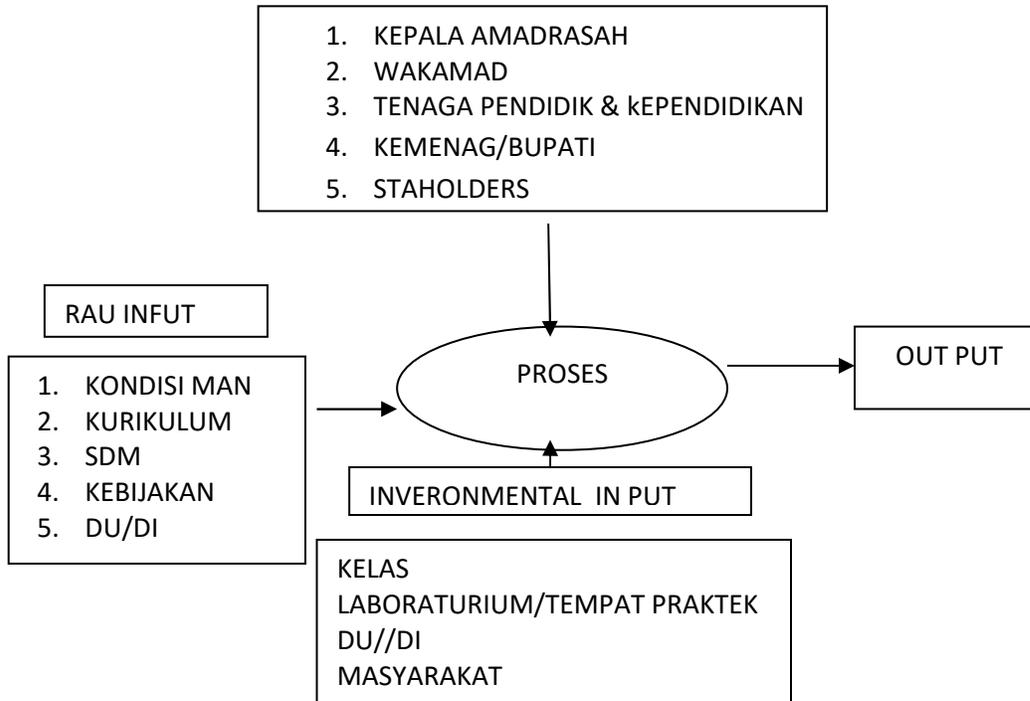
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menemukan minimal prinsip-prinsip pengembangan program pendidikan keterampilan pada MAN Percontohan di Kalimantan Selatan. Berdasarkan hal tersebut, hasil penelitian ini dapat memperkaya dan mendukung teori pembelajaran keterampilan , khususnya pengembangan program pendidikan keterampilan, sebagai sebuah disiplin ilmu dari sistem permadrasahan.

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah tentang pengembangan program pendidikan keterampilan , sehingga informasinya dapat:

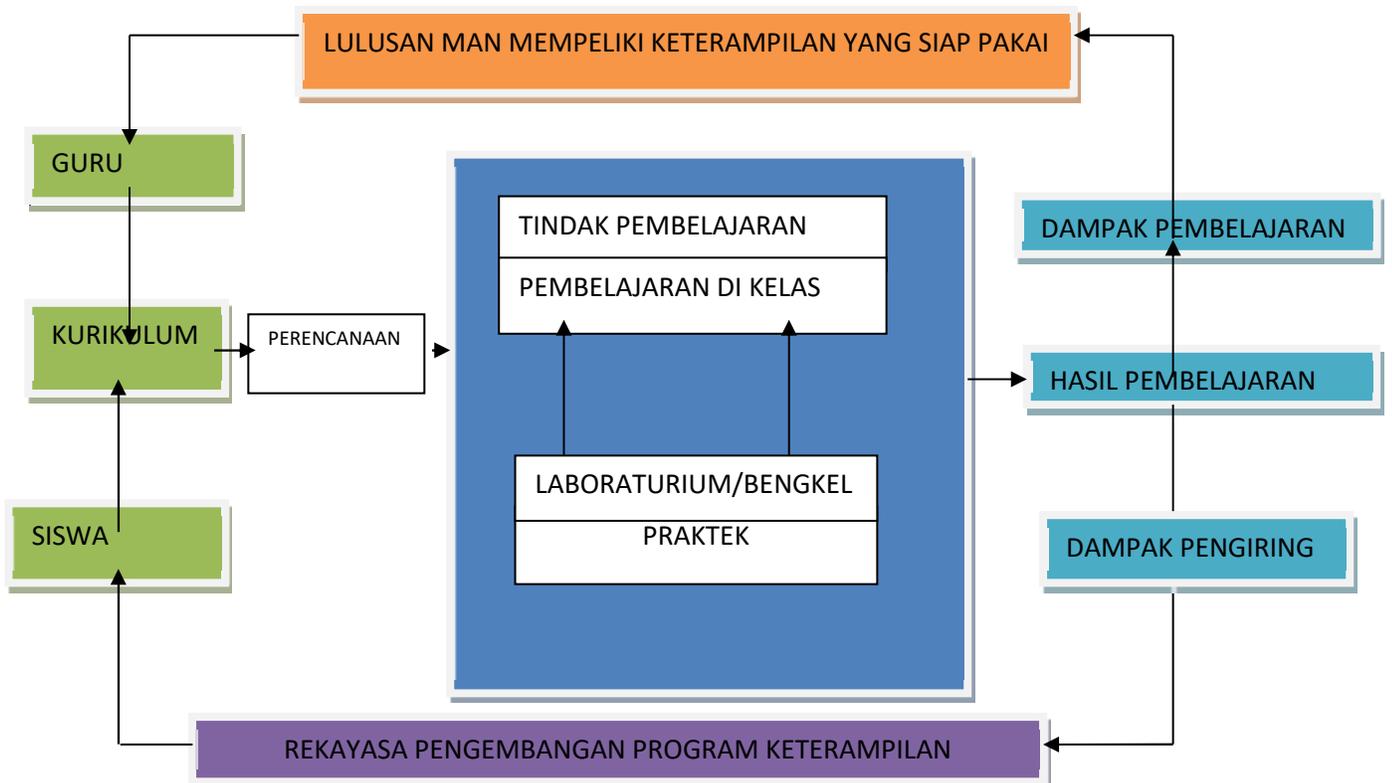
1. Sebagai acuan dalam menyusun perencanaan bagi madrasah-madarasah Aliyah yang mau mengembangkan program keterampilan
2. Mendorong guru dan tenaga kependidikan dalam beraktivitas yang lebih maksimal dalam mengembangkan program pendidikan keterampilan pada MAN di provinsi Kalimantan Selatan
3. Dijadikan dasar pertimbangan para pemegang kebijakan untuk membuat keputusan tentang pengembangan program pendidikan keterampilan;
4. Bagi Kementerian Agama, khususnya Kanwil Kemenag provinsi merupakan masukan yang berharga untuk mengembangkan program pendidikan keterampilan , agar relevan dengan kebutuhan di lapangan;
5. Bagi MAN percontohan yang menjadi sasaran penelitian, hal ini akan memberikan implikasi positif bagi peningkatan kinerja guru dalam pengembangan program pendidikan keterampilan;

#### **E. Paradigma Penelitian**

Di era digitalisasi dan globalisasi saat ini menuntut perubahan berbagai sistem kehidupan. Untuk dapat eksis dan hidup secara wajar dalam kehidupan global, seseorang memerlukan perubahan kualitas dalam berbagai aspek potensinya, seperti kualitas intelektual, emosional, skill dan spiritual religius secara seimbang dan dikemas dalam bentuk profesionalitas yang tinggi. Hal tersebut menuntut rancangan pendidikan dan pengembangan pembelajaran yang berkualitas pula. Kualitas pendidikan berkaitan erat dengan kualitas komponen-komponen yang terlibat di dalamnya seperti guru, siswa, kurikulum, proses, sarana dan pasilitas, serta lingkungan yang mendukungnya. Secara skematis aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kualitas hasil pengembangan program pendidikan keterampilan dan sekaligus terlibat dalam penelitian ini digambarkan dalam bagan berikut:



Adapun kegiatan pengembangan program pendidikan keterampilan pada MAN percontohan di Kalimantan Selatan dapat dipetakan dalam bentuk bagan berikut:



## F. Kajian penelitian Terdahulu

Paryono (2005) menggambarkan tahun 1997, krisis ekonomi telah melanda Indonesia dan negara di Asia Tenggara lainnya. Hal itu tentu mempengaruhi semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan<sup>3</sup>. Untuk menjembatani permasalahan tersebut salah satunya adalah memberikan perhatian dengan bagaimana membuat kebijakan pendidikan terbaik untuk masa berikutnya di masa yang akan datang. Untuk itu perlu dilakukan kajian terhadap kebijakan dan implementasi pendidikan yang sudah ada agar dapat memberikan respon terhadap krisis ekonomi yang juga terkait dengan pendidikan dan pengembangan tenaga kerja.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji mobilisasi, anggaran pendidikan dan dunia kerja selama krisis ekonomi tersebut. Penelitian ini juga mengkaji kebijakan-kebijakan dan implementasi pendidikan yang terkait dengan pendidikan ketenagakerjaan dan pengembangan yang dibuat untuk merespon krisis ekonomi.

Temuan pada trend mobilisasi menunjukkan bahwa dampak krisis ekonomi pada mobilisasi siswa di Indonesia diprediksi dengan serius. Pada kenyataannya, dampak jangka pendeknya yang diukur setahun setelah mulai terjadi krisis ekonomi, menunjukkan bahwa pendidikan menengah vokasional dan teknik dan program pendidikan diploma menambah mobilisasi. Tetapi trend jangka panjang yang diukur sebelum dan sesudah 5 tahun terjadi krisis ekonomi tersebut menunjukkan bahwa mobilisasi pada pendidikan ketenagakerjaan menengah dan tinggi menjadi lambat. Pada kenyataannya, mobilisasi pada program diploma pada lembaga pendidikan tinggi negeri terus mengalami penurunan sepanjang waktu. Di antara trend lainnya, anggaran pendidikan secara teratur dialokasikan untuk pendidikan menengah vokasional dan teknik di Indonesia bertambah dalam rupiah, tetapi tidak demikian dalam dolar Amerika. Anggaran pembangunan, dalam rupiah dan dolar Amerika berkurang.

Trend pada dunia kerja mengalami perubahan selama krisis ekonomi. Sektor penting pada dunia kerja mulai lebih diperhatikan pada tenaga kerja selama krisis ekonomi di

---

<sup>3</sup> Paryono. (2005) *Workforce education and development during economic crisis: a case study in Indonesia*, Thesis, The Graduate School, College of Education, The Pennsylvania State University.

Indonesia. Sektor menengah dan tinggi pada dunia kerja menurun selama krisis ekonomi. Temuan tentang pelaksanaan pendidikan pada tingkat madrasah menunjukkan bahwa pelaksana madrasah mengalami masalah yang berbeda-beda. Respon kebanyakan adalah dengan bertambahnya mobilisasi dengan mengintensipkan program. Dalam merespon *dropout* siswa, pelaksana madrasah menerapkan metode subsidi silang. Subsidi silang diterapkan dengan memberi sejumlah beasiswa pendidikan yang didasarkan pada pendapatan orang tua. Komersialisasi pendidikan secara signifikan mengurangi jumlah siswa dari keluarga miskin.

Untuk mempertahankan mobilisasi pada level nasional, pemerintah memberikan sejenis pendampingan (*assistance*) pada siswa dan madrasah dengan menciptakan jaring pengaman sosial (*social safety net*). Berbagai jenis program pelatihan teknik dan vokasional juga dibuat untuk menambah partisipasi perempuan dan para santri di pesantren-pesantren (*religious boarding schools*). Pemerintah Indonesia bergerak secara bertahap memberikan dana dari pemerintah pusat ke perguruan tinggi dengan inisiasi otonomi dan desentralisasi pendidikan tinggi. Otonomi dan swastanisasi dimulai untuk memberdayakan dan untuk mendampingi perguruan tinggi negeri agar secara bertahap menjadi lebih mandiri dari pemerintah pusat. Tetapi, inisiatif berpengaruh negatif pada mobilisasi perguruan tinggi swasta disebabkan bertambahnya program ekstensi pada perguruan tinggi negeri untuk menamhah pendanaan. Bantuan dana kompetitif (*competitive grants*) dari perguruan tinggi negeri dan swasta telah dimulai dan semakin bertambah dari tahun ke tahun. Kebijakan pertumbuhan nol (*zero-growth*) dilaksanakan di perguruan tinggi negeri di Indonesia.

Dalam merespon trend dunia kerja dan kesulitan-kesulitan yang dialami lulusan madrasah dan perguruan tinggi dalam menemukan dan menciptakan pekerjaan, maka standarisasi kompetensi semakin diperkuat dan program kewirausahaan (*entrepreneurship*) diintegrasikan dalam kurikulum madrasah. Dalam merespon bertambahnya dunia kerja di sektor penting di Indonesia pemerintah pusat merekomendasikan program terbuka dan luas pada program-program yang terkait dengan budaya pertanian dan juga mendorong madrasah untuk membuka program-program baru yang lebih dapat dipasarkan.

Temuan-temuan Paryono dari studi kasus di Indonesia tersebut juga dibandingkan dengan temuan-temuan dari Thailand dan Korea Selatan Untuk menemukan kesamaan dan perbedaannya. Ditemukan kebijakan-kebijakan yang sama dibuat pada level nasional di tiga

negara ini dalam merespon kesulitan-kesulitan pembiayaan pendidikan, seperti otonomi dan desentralisasi, kebijakan pertumbuhan nol, dan berbagai macam program untuk membantu siswa agar tetap bermadrasah.

Beberapa rekomendasi telah dibuat untuk pembuat kebijakan dan penelitian berikutnya. Rekomendasi untuk pembuat kebijakan tersebut termasuk pentingnya menambah mobilisasi pada program diploma untuk mempersiapkan tenaga kerja menengah-terampil, prioritas pendanaan, kebutuhan untuk regulasi dunia kerja, dan kebutuhan dalam menentukan bisnis dan industri semacam apa yang memberikan keuntungan kompetitif bagi negara. Rekomendasi untuk penelitian berikutnya termasuk saran untuk topik-topik penelitian dan bagaimana mengatur data sekunder di Indonesia.

Kickpatrick dan Allen (2001) melakukan penelitian ini terkait dengan Australia, dan beberapa penelitian internasional yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan pada pendidikan keterampilan oleh individu, perusahaan, industri, masyarakat dan wilayah. Penelitian ini berdasarkan fokus penelitian dan mengangkat kesenjangan pada kebutuhan untuk menjadi perhatian bagi kebijakan dan riset pendidikan keterampilan di masa datang. Kebutuhan untuk pendidikan keterampilan adalah partisipasi yang diinginkan dan dibutuhkan dalam program pendidikan keterampilan. Individu, perusahaan, industri, masyarakat, wilayah dan negara merupakan *stakeholder* pada pendidikan keterampilan.

Formasi keterampilan yang tinggi harus ada komitmen dari pemerintah dan mayoritas perusahaan besar, masyarakat luas, akuntabilitas untuk menjamin kuantitas dan kualitas pelatihan yang cukup, kesempatan agar semua terlibat, insentif untuk kaum muda dan tenaga kerja untuk mengikuti pelatihan, dan metode pelatihan yang fleksibel. Ukuran yang dapat membantu mempertemukan tuntutan pendidikan keterampilan dari keadilan terhadap pelanggan pendidikan keterampilan termasuk memodifikasi pelatihan untuk beragam kelompok, jadwal yang fleksibel dan penyelenggaraan yang luwes. Pelanggan membutuhkan informasi tentang titik masuk dan jalurnya. Jalur yang jelas antar pendidikan luar madrasah dan pendidikan keterampilan menambah tuntutan pada pendidikan keterampilan. Pengajaran profesional membutuhkan untuk bekerja dengan industri dan perusahaan dalam rangka menambah kebutuhan dengan mengembangkan pelatihan yang relevan. Mereka harus memahami kebutuhan dan pengalaman setiap hari bagi usaha kecil. Fokus kebijakan sekarang pada kebutuhan industri dan perusahaan sebaiknya dievaluasi

kembali dalam konteks yang lebih luas terhadap tuntutan *stakeholders* lainnya yang memiliki minat lebih panjang.

Penelitian yang dilakukan oleh Noto Widodo (2005) menunjukkan bahwa penyelenggaraan program keterampilan di tiap madrasah khususnya Madrasah Aliyah Negeri, memiliki model yang beragam disebabkan kondisi masing-masing madrasah yang berbeda dalam beberapa hal, misalnya dilihat dari faktor sarana prasarana, kondisi lingkungan, ketersediaan tenaga pengajar, dan sebagainya. Pola penyelenggaraan program keterampilan ada beberapa alternatif, sebagai berikut (1) diselenggarakan di madrasah sendiri dengan melengkapi segala sarana pendidikan keterampilan; (2) kerjasama dengan lembaga pelatihan keterampilan yang ada masing-masing, seperti Balai pelatihan Kerja atau Balai Latihan Teknik, dan (3) kerjasama antara madrasah dengan dunia usaha/industri terdekat<sup>4</sup>.

Dari beberapa kajian tersebut di atas bahwa ; (1) pendidikan keterampilan menekankan pada penyiapan peserta didik untuk siap bekerja, dengan paling tidak satu jenis pekerjaan, mengembangkan kemampuan peserta didik, dan mempergunakan teknologi tertentu, (2) Madrasah Aliyah merupakan lembaga pendidikan tingkat menengah plus agama Islam, sehingga memiliki pendidikan agama yang diajarkan secara luas, (3) diperlukan integrasi antara pendidikan keterampilan dengan pendidikan agama dalam bentuk pendidikan keterampilan di Madrasah Aliyah, (4) lulusan Madrasah Aliyah melanjutkan ke perguruan tinggi dan bekerja, (5) untuk bekerja, makalulusan Madrasah Aliyah memerlukan keterampilan untuk bekerja, (6) diperlukan model pendidikan keterampilan di Madrasah aliyah yang selanjutnya bias dikembangkan menjadi Madrasah Aliyah kejuruan, (7) dalam pengembangan model diperlukan hasil pengamatan dan penelitian mendalam pada Madrasah Aliyah yang menyelenggarakan keterampilan serta pendapat praktisi pendidikan, pengambil kebijakan, kepala madrasah, guru, tentang pendidikan keterampilan di Madrasah Aliyah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## G. Kerangka Teori

---

<sup>4</sup> Noto Widodo. (2005). Penyelenggaraan Program Keterampilan di Madrasah Aliyah Provinsi Jawa Tengah Tesis tidak diterbitkan PPs UNY

## 1. Pelaksanaan Pendidikan Ketrampilan

Secara institusional Madrasah Aliyah memiliki tujuan pendidikan, yaitu :1) Menyiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi. 2) Menyiapkan siswa agar mampu mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang dijiwai ajaran agama Islam, dan 3) Menyiapkan siswa agar mampu menjadi anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar yang dijiwai suasana keagamaan.

Program Ketrampilan merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang diberikan kepada siswa sebanyak 18 jam pelajaran perminggu. Program ini cukup padat karena siswa mengikutinya setiap minggu harus menerima pelajaran reguler 45 pelajaran perminggu dan tambahan pelajaran 18 jam perminggu, sehingga mereka menerima 63 jam pelajaran perminggu. Pelaksanaan struktur program pendidikan ketrampilan adalah 30 % teori dan 70 % praktek sebagaimana tercantum dalam garis-garis besar program pengajaran (GBPP) sesuai dengan surat keputusan Dirjen Bimbingan Islam No. E/248.A/1997 Tanggal 27 Oktober 1997 tentang kurikulum program pendidikan keterampilan.

### a. Prinsip dan Tujuan Pelaksanaan Pendidikan Ketrampilan

Sebagai acuan dasar dalam penyelenggaraan Broad Based Education (BBE) yang berorientasi pada life skill, tim BBE Depdiknas mengemukakan prinsip-prinsip penyelenggaraan sebagai berikut: 1) Tidak mengubah sistem pendidikan yang berlaku saat ini 2) Tidak menurunkan pendidikan menjadi sebatas pelatihan 3) Etika sosio-religius bangsa yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang diintegrasikan 4) Pembelajaran menggunakan prinsip learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together and learning to cooperative. 5) Pengembangan potensi wilayah dapat direfleksikan dalam penyelenggaraan pendidikan 6) Penerapan manajemen berbasis madrasah dan masyarakat, merupakan kolaborasi semua unsur terkait yang ada dalam masyarakat dapat diwadahi 7) Paradigma school to work dapat menjadi dasar semua kegiatan pendidikan. Tujuan dari pelaksanaan pendidikan ketrampilan di arahkan pada link and mach yaitu untuk mendapatkan mutu sumber daya manusia, terutama yang berhubungan dengan kualitas

ketenagakerjaan, dimana dunia pendidikan sebagai penyedia SDM dan Dunia Usaha dan Dunia Industri DUDI serta masyarakat sebagai pihak yang membutuhkan.<sup>5</sup>

Sedangkan fungsi link and mach dalam pelaksanaan pendidikan ketrampilan yakni sebagai wahana atau instrumen bagi pembangunan dan perubahan sosial dalam artian bahwa program ini dapat memberikan suatu lapangan kerja alternatif kepada siswa (learning to do) sekaligus bermanfaat sebagai investasi untuk pembangunan masa depan atau mampu untuk memberikan motivasi untuk hidup dalam era sekarang dan memiliki orientasi hidup ke masa depan (learning to be). Tujuan pendidikan ketrampilan berdasarkan sistem broad based education adalah konsep pendidikan kejujuran untuk dapat mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam rangka untuk memperoleh pekerjaan yang layak sesuai dengan standar hidup, bagi pendidikan formal adalah untuk memberikan ketrampilan dasar bagi siswa madrasah menengah yang dirasa nantinya tidak melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi.<sup>6</sup>

b. Materi Pendidikan Ketrampilan di Madrasah

Salah satu komponen operasional pendidikan sebagai suatu sistem adalah materi atau disebut kurikulum jika dikatakan kurikulum maka ia mengandung pengertian bahwa materi yang diajarkan atau didikan telah tersusun secara sistematis dengan tujuan yang hendak dicapai atau telah ditetapkan. (Arifin, 2000)

Pada jenjang pendidikan di madrasah umum (SMU atau MA) selain penekanan kecakapan akademik, dan general life skill perlu ditambahkan (vocational skills) sebagai bekalantisipasi di dalam memasuki dunia kerja apabila mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan. Sedangkan pelaksanaan life skill di madrasah harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan fisiologis dan psikologis peserta didik. Pada pelaksanaan pendidikan vocational skills di SMU atau MA dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan :  $\frac{3}{4}$  (1) reorientasi Pembelajaran (2) pembekalan kecakapan vocational bagi siswa yang berpotensi untuk tidak melanjutkan dan putus

---

<sup>5</sup> Anwar, (2004) *Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill Education)*, (Bandung: Alfabeta.

<sup>6</sup> *Ibid*

madrasah. (3) reformasi madrasah di bidang budaya manajemen dan hukum yang sinergi dengan masyarakat.<sup>7</sup>

Materi yang diterapkan di dalam pendidikan ketrampilan menggunakan pelajaran-pelajaran yang diajarkan dengan teori serta praktek dan dalam hal ini materi yang diajarkan pada siswa lebih menekankan pada aspek psikomotoris atau lebih bekerja. Artinya disini pelaksanaan pembelajarannya lebih banyak praktek dari pada teori. Misalnya elektronika, komputer, menjahit, merias dan otomotif dan lain-lain.

c. Sumber dan Media Pendidikan Ketrampilan

Media dan sumber belajar bagi Madrasah Aliyah yang memiliki program keterampilan, mempunyai arti yang sangat penting. Baik media maupun sumber belajar sangat berperan untuk meningkatkan efektifitas pembelajaran. Adalah tidak mungkin belajar keterampilan tanpa kehadiran media dan sumber belajar di madrasah. Hal ini sangat berbeda dengan madrasah umum. Pembelajaran keterampilan yang lebih menitik beratkan pada penguasaan kompetensi/ skill, dengan perbandingan 30 % teori dan 70 % praktek sangat menuntut hadirnya media dan sumber belajar yang memadai. Oleh karena itu program keterampilan yang ada di MAN dan MAS mendapat perhatian tersendiri dari Kementerian Agama RI, sehingga hampir semua peralatan yang berupa media dan sumber belajar dipenuhi. Kementerian Agama juga mengangkat para guru negeri untuk semua bidang keterampilan walaupun dalam jumlah yang terbatas. Dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru/ instruktur, baik di lembaga pelatihan maupun di madrasah, sangat memerlukan sarana alat bantu belajar mengajar untuk mempermudah dan memperjelas penyampaian materi dan keterampilan kepada siswa. Alat bantu mengajar pada dasarnya berfungsi untuk: 1) memperjelas informasi, 2) memberi informasi tambahan, 3) menggambarkan bagian-bagian benda yang kecil, 4) membuat variasi dalam kegiatan belajar mengajar, 5) mempermudah komunikasi antara guru dan murid, dan 6) memberi kesempatan pada siswa untuk mencerna materi pelajaran. Walaupun demikian, semua peralatan yang diperoleh dari pemerintah keberadaannya sangat berarti bagi keberlangsungan program-

---

<sup>7</sup> *ibid*

program keterampilan yang ada di Madrasah Aliyah, terlebih lagi dalam memfasilitasi proses belajar mengajar keterampilan.

d. Tantangan MAN dalam Mengembangkan Program Keterampilan

Kini setiap lembaga pendidikan berusaha keras memasukkan kegiatan-kegiatan yang mampu merangsang kreativitas. Salah satu wujud usaha tersebut adalah adanya kurikulum keterampilan atau vokasi di lembaga pendidikan madrasah. Direktorat Pendidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, sebagai lembaga pemerintah yang membawahi semua madrasah di Indonesia, mencatat setidaknya adalah 234 madrasah yang memiliki program keterampilan sejak 1998 hingga sekarang. Sebagian besar di bidang otomotif dan tata busana (menjahit), sisanya di bidang komputer, teknologi informasi, teknik mesin, elektro, tata boga, kerajinan, pertanian, peternakan, dan sebagainya.

Dari sekian jumlah MAN yang di tunjuk oleh Kementerian Agama sebagai penyelenggara program pendidikan keterampilan, madrasah-madrasah yang memiliki program keterampilan yang sudah mapan adalah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Garut, MAN 2 Jakarta, MAN Kendal, MAN 1 Jember, dan MAN 2 Banjarmasin. Program keterampilan yang diajarkan antara lain otomotif, tata busana, dan elektro. Ada juga beberapa madrasah aliyah yang baru lahir, misalnya MAN 2 Wates yang memiliki program keterampilan tata busana, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta pengolahan hasil pertanian. Program madrasah keterampilan ini didukung oleh Peraturan Menteri Agama RI Nomor 60 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah. Madrasah keterampilan merupakan prototipe madrasah aliyah yang mengembangkan keunggulan kompetitif di bidang keterampilan atau kejuruan atau kecakapan hidup. Untuk mendukung program ini, Direktorat Pendidikan Madrasah mengalokasikan anggaran dana pengembangan-pengembangan keterampilan di madrasah aliyah tersebut.

Madrasah-madrasah yang telah ditunjuk sebagai penyelenggara ternyata banyak sekali tantangannya, diantaranya; 1) sumberdaya manusia (SDM) yakni

tenaga pendidik; 2) sarana dan prasarana; 3) biaya operasional; 4) waktu praktek; 5) tempat magang

e. Evaluasi Hasil Belajar Ketrampilan

Untuk mengetahui hasil program ketrampilan siswa dalam bidang yang dipelajari di madrasah maka diadakan evaluasi baik proses maupun hasil. Dengan demikian diketahui hasil para siswa program ketrampilan setelah mereka selesai mengikutinya. Dengan demikian untuk mengetahui sejauh mana mereka menguasai bidang yang sudah ditekuninya, pada akhir masa studi dilakukan uji kemampuan dengan standard dunia kerja yang dilakukan BLKI. Evaluasi program dilaksanakan untuk menilai kegiatan instruksional mulai dari pembuatan satuan acara pengajaran, pelaksanaan pembelajaran sampai dengan hasil belajar. Hal ini penting untuk dilaksanakan agar dari waktu ke waktu kita dapat memperbaiki serta dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan instruksional untuk mencapai tujuan.<sup>33</sup> Evaluasi pembelajaran dilakukan setiap akhir penyelesaian satu standar kompetensi atau beberapa penyelesaian kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran. Adapun standar kompetensi kelulusan dalam pendidikan ketrampilan

## **BAB II METODE PENELITIAN**

### **A. Pendekatan dan Rancangan Penelitian**

Manajemen pengembangan kurikulum program pendidikan keterampilan Madrasah Aliyah merupakan fokus utama dalam kajian penelitian ini. Kajian dalam penelitian dilakukan dengan observasi yang mendalam dengan kealamiahannya (*natural setting*). Oleh sebab itu yang sesuai untuk pendekatannya adalah kualitatif<sup>8</sup>. Di samping hal itu, alasan pemilihan pendekatan kualitatif adalah karena penelitian tentang ”program pendidikan keterampilan” memang lebih sesuai didekati dengan kualitatif<sup>9</sup>, dan bila ditelusuri akar perkembangannya, merupakan pendukung pendekatan penelitian kualitatif.

Rancangan penelitian multisitus dilakukan dengan cara melakukan eksplorasi data secara mendalam dalam salah satu situs sebelum berpindah ke situs lainnya. Berdasarkan rancangan tersebut, maka data tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan induksi termodifikasi (*Modified Analytic Induction*). (Bogdan dan Biklen dalam Ulfatin 2015)<sup>10</sup>. Induksi analisis termodifikasi melakukan analisis temuan-temuan penelitian yang memiliki kesamaan-kesamaan untuk kemudian dapat dilakukan kesimpulan akhir. Oleh karena itu sebelum menggunakan analisis ini setting lokasi penelitian diupayakan, memiliki kesamaan-kesamaan sehingga temuannya lebih kuat dari desain studi kasus lainnya.

Penelitian ini memiliki tiga lokasi penelitian, maka prosedur yang sama diterapkan pada masing-masing lokasi penelitian tersebut, oleh karena itu dibutuhkan studi lintas situs, yang akan dipaparkan lebih pada bab analisis data.

Dari gambaran tersebut diketahui bahwa rancangan penelitian ini dimulai dengan studi awal untuk menghasilkan konteks penelitian yang diperoleh dari kajian pustaka dan studi lapangan. Dari konteks tersebut disusun fokus penelitian. Fokus penelitian yang utama muncul berdasarkan studi lapangan yang dilakukan peneliti. Dalam Gambar 2.1 perlu dijelaskan bahwa kajian pustaka dalam studi awal dimaksudkan untuk mencari isu-isu yang menarik terkait dengan pendidikan dan

---

<sup>8</sup> Ulfatin, N., (2015). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Penelitian Pendidikan: Teori dan Praktek*. Malang: Media Nusantara Creative, hal. 15

<sup>9</sup> Sudarman Danin, (2007) *Metode Penelitian Untuk Ilmu-Ilmu Prilaku*, Jakarta, Bumi Aksara, hal. 96

<sup>10</sup> Ulfatin *Op Cit*, hal 35

manajemen pendidikan sesuai konsentrasi peneliti. Hal ini perlu ditegaskan karena supaya tidak terjadi kesalahpahaman terkait tentang fokus yang diambil dari kajian pustaka, karena fokus penelitian diambil dari konteks penelitian dan studi lapangan.

Setelah fokus penelitian diketahui maka kegiatan berikutnya adalah pengumpulan data, pengecekan data dan analisis data pada situs 1. Setelah kegiatan tersebut selesai, kemudian ditarik suatu temuan sementara dalam situs. Kegiatan berikutnya pengumpulan data, pengecekan data dan analisis data dilanjutkan pada situs 2 dan ditarik temuan sementara dari situs 2. Berdasarkan dua kegiatan ini diperoleh temuan sementara yang sama antara situs 1 dan situs 2. Kegiatan berikutnya adalah pengumpulan data, pengecekan data dan analisis data dilanjutkan pada situs 3, dan ditarik temuan sementara dari situs 3. Selanjutnya temuan sementara situs 1 dan situs 2 digabung dengan temuan Sementara yang sama dengan situs 3 untuk ditarik kesimpulan penelitian.

Dalam penelitian ini fokus penelitian dapat berubah sesuai dengan hasil pengumpulan data disitus penelitian. Kesimpulan penelitian ditarik berdasarkan fokus penelitian setelah fokus tersebut tetap dan sesuai dengan data di lapangan setelah selesai menarik kesimpulan kegiatan selanjutnya adalah pelaporan dan presentasi.

#### B. Data, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data

Data, sumber data dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disajikan dalam tabel berikut:

No	Data	Sumber Data	Teknik Pengmpulan Data
1	Studi Literatur dan Hasil Penelitian a. Mengkaji teori dan konsep-kopnsep yang berhubungan dengan model pembelajaran keterampilan yang relevan dengan karakteristik peserta didik b. Mengkaji temuan-temuan penelitian yang berhubungan dengan pengembangan program Keterampilan.	dokumen	dokumenter
2	Studi tentang pengembangan proram Pendidikan Keterampilan pada MAN Percontohan	Dokumen, Kepala Madrasah, dan	

	<p>a. Mengkaji kurikulum dan desain pembelajaran program Pendidikan Keterampilan yang sedang digunakan pada MAN Percontohan.</p> <p>b. Sumber Daya Manusia dalam mengembangkan program pendidikan keterampilan pada MAN percontohan di Kalimantan Selatan</p> <p>c. Kebijakan Pemerintah dalam megembangkan program pendidikan keterampilan pada MAN percontohan di Kalimantan Selatan</p> <p>d. Sikap masyarakat (dunia usaha dan dunia industry) dalam mengembangkan program pendidikan keterampilan pada MAN percontohan di Kalimantan Selatan</p>	<p>Wakil Kepala Madrasah</p> <p>Kepala,wakil Madrasah</p> <p>Kakanwil, Kemenag Kementerian Agama, Pemerintah Kab/Kota</p> <p>rakat/Dunia Usaha dan Dunia Industri</p>	<p>Documenter, Wawancara</p> <p>Wawancara</p> <p>Wawancara</p> <p>Wawancara</p>
--	---	---	---

### C. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh melalui berbagai teknik penggalian data di atas diolah dan dianalisis dengan pendekatan *deskriptif-kualitatif*. Miles dan Huberman membagi kegiatan analisis dalam tiga alur secara bersamaan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Dalam kegiatan reduksi data, data yang diperoleh di lapangan disederhanakan, diabstraksikan, dan ditransformasikan secara terus-menerus. Kegiatan abstraksi dilakukan dalam bentuk membuat ringkasan, pengkodean, penelusuran tema,

## BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang paparan analisis data, berkaitan dengan temuan Tantangan MAN dalam Mengembangkan Program Pendidikan Keterampilan, dibagi 4 rumusan masalah yang sudah ditetapkan yaitu (1) mendiskripsikan implementasi kurikulum program pendidikan keterampilan pada MAN percontohan di Kalimantan Selatan; (2) mendiskripsikan Sumber Daya Manusia dalam mengembangkan program pendidikan keterampilan pada MAN percontohan di Kalimantan Selatan; (3) mendiskripsikan kebijakan pemerintah dalam mengembangkan program pendidikan keterampilan pada MAN percontohan di Kalimantan Selatan; (4) mendiskripsikan sikap dunia usaha dan dunia industri dalam mengembangkan program pendidikan keterampilan pada MAN percontohan di Kalimantan Selatan. Hasil dari semuanya dirangkum dalam analisis data sebagai berikut:

1. Implementasi kurikulum program pendidikan keterampilan pada MAN percontohan di Kalimantan Selatan.

Implementasi kurikulum program pendidikan keterampilan pada 2 Barabai, MAN 2 Amuntai dan MAN 2 Banjarmasin telah sesuai dengan pedoman kurikulum program pendidikan keterampilan yang dikeluarkan oleh kementerian Agama RI, melalui surat edaran Dirjen Pendidikan Agama Islam Nomor 01/Dj.I/Dt.I.1/03/2016 dari hasil observasi Partisipan tim peneliti dibalik implementasi tersebut ditemukan beberapa hal yaitu melakukan integrasi kurikulum pendidikan keterampilan di Madrasah Aliyah ke dalam beberapa langkah yang cocok untuk integrasi kurikulum pendidikan keterampilan dengan pendidikan agama; yaitu : (1) integrasi isi mata pelajaran agama ke dalam pendidikan keterampilan; (2) dalam bentuk kelaster bidang pekerjaan yang dapat diberikan pada madrasah sehingga memungkinkan kontak dengan wirausaha (*employers*) dan perguruan tinggi; (3) kolaborasi mata pelajaran agama dan keterampilan untuk meningkatkan kompetensi agama dalam pendidikan keterampilan; (4) kolaborasi guru agama dan keterampilan untuk menyusun inti mata pelajaran agama yang terkait dengan dunia usaha/kerja; (5) melibatkan guru agama dan keterampilan dalam menyusun kurikulum sekitar proyek kegiatan peserta didik; (6) membuat mata pelajaran agama lebih relevan dengan keterampilan; (7) menyusun kurikulum dengan memodifikasi mata pelajaran agama dan keterampilan; dan (8) kolaborasi guru agama dan keterampilan untuk bidang pekerjaan tertentu.

## 2. Peningkatan Sumber Daya Manusia.

Sumber daya manusia (SDM) khususnya guru pengampu sebagai penyelenggara proses pembelajaran program pendidikan keterampilan pada MAN penyelenggara program masih belum terkecukupi, dan juga masih banyak yang belum sesuai dengan latar belakang pendidikan/keahliannya (*mismatch*). Seharusnya pemerintah khususnya Kementerian Agama sebagai penanggung jawab penyelenggara program pendidikan keterampilan harus memiliki perencanaan secara matang untuk mempersiapkan guru-guru pogram keterampilan diseluruh Indonesia khususnya provinsi Kalimantan Selatan., sebelum melaksanakan proragm tersebut.

perencanaan menurut Zajda dan Gamage dalam Husaini Usman, sebagai berikut: *Planing is process that precedes decicion making. A plan is can be defined as a decision, with regard to couse of action.*<sup>11</sup> Artinya: Perencanaan adalah proses yang mendahului pengambilan keputusan. Sebuah rencana yang dapat didefinisikan sebagai keputusan, berkaitan dengan tindakan

Perencanaan sering disebut jembatan yang menghubungkan kesenjangan atau jurang antara keadaan masa kini dan keadaan yang diharapkan terjadi pada masa yang akan datang. Meskipun keadaan masa depan yang tepat itu sukar diperkirakan karena banyak faktor diluar penguasaan manusia yang berpengaruh terhdap rencana tetapi tanpa perencanaan kita akan menyerahkan keadaan pada masa yang akan datang itu kepada kebetulankebetulan.

Itulah sebabnya menyerahkan perencanaan sebagai suatu proses intelektual yang menentukan secara sadar tindakan yang akan ditempuh dan mendasarkan keputusan-keputusan pada tujuan yang hendak dicapai, informasi tepat waktu, dan dapat dipercaya serta memperhatikan perkiraan keadaan yang akan datang. Untuk itu, perencanaan membutuhkan data dan informasi keputusan yang diambil tidak lepas kaitannya dengan masalah yang dihadapi pada masa yang akan datang.<sup>12</sup>

Seluruh MAN penyelenggara program yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan sangat sedikit sekali guru yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai

---

<sup>11</sup> Husaini Usman, *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014) h.77

<sup>12</sup> Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 49-50.

dengan bidang keahliannya, itupun guru honorer saja yang memiliki sesuai dengan bidang keahliannya, Sedangkan guru yang lainnya hanya diberikan pelatihan-pelatihan dengan waktu yang terbatas, serta melibatkan diri di MGMP intern, maupun mengikuti di luar seperti MGMP pada SMK yang mengundang.

Dari berbagai tantangan dan kekurangan tersebut idealnya pemerintah pusat khususnya Kementerian Agama melakukan perencanaan yang matang untuk menyusun langkah-langkah :

- a. Pengangkatan guru khusus bidang keterampilan yang sesuai dengan bidang yang dibutuhkan, sesuai dengan usulan daerah masing-masing.
- b. Melaksanakan pelatihan-pelatihan sesuai dengan rumpun bidangnya masing-masing.
- c. Pihak Madrasah Penyelenggara meningkatkan aktivitas MGMP bidang keterampilan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut MAN sebagai penyelenggara program pendidikan keterampilan mudah untuk meningkatkan kualitas baik dalam proses pembelajaran maupun skillnya (hasilnya). Dengan demikian kepercayaan masyarakat akan lebih tinggi MAN sebagai penyelenggara program pendidikan keterampilan.

### 3. Kebijakan Pemerintah

Pemerintah pusat dan daerah harus sinergi dalam mengambil kebijakan, agar program pendidikan keterampilan bisa berjalan dengan baik dan lancar, sementara ini kebijakan pemerintah pusat dan daerah masih belum sinkron, hal disebabkan ada dua kondisi yang berbeda yakni Kementerian Agama masih sentralisasi, sedangkan pemerintah daerah disentralisasi.

Perbedaan ini sangat elastis karena walaupun MIN, MTsN, MAN itu milik kementerian agama, sedangkan SD, SMP, SMA/SMK milik Dikbud (pemda), keduanya itu adalah aset daerah yang harus dikembangkan, karena sama-sama meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah. Untuk sementara ini MAN belum begitu diperhatikan oleh pemerintah daerah, khususnya kebijakan untuk penganggaran pengembangan program pendidikan keterampilan.

Tantangan yang di hadapai MAN penyelenggara program pendidikan keterampilan di Kalimantan Selatan adalah kebijakan pemerintah daerah, dimana belum ada kesenergian antara pemerintah pusat kementerian agama dengan pemerintah daerah (pemda kabupaten/kota). Hal ini senada dengan ungkapan David Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino (2009: 19) memberikan definisi kebijakan

publik sebagai “ the autorative allocation of values for the whole society”<sup>13</sup>. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara syah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “*authorities in a political system*” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik/kebijakan sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Dengan kebijakan tersebut, maka MAN sebagai penyelenggara pendidikan, khusus program pendidikan keterampilan bisa berjalan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, dan akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya.

#### 4. Dunia Usaha dan Dunia Industri

Dalam pelaksanaan program kegiatan kerjasama antara madrasah dengan industri perlu disepakati model atau pola pengaturan penyelenggaraan program, khususnya yang menyangkut tentang kapan dilaksanakan di madrasah dan kapan dilaksanakan di Institusi Pasangan. Dengan demikian praktik kerja industri diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian profesi tertentu secara terstandar sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Oleh karena itu segala sesuatu yang berhubungan dengan perencanaan, penyelenggaraan dan penilaian pendidikan harus senantiasa mengacu pada pencapaian standar kemampuan profesional sesuai dengan tuntutan jabatan pekerjaan atau profesi tertentu yang berlaku di lapangan kerja.

Oleh karena itu, penyelenggara pendidikan, madrasah kejuruan tidak mempersiapkan peserta didiknya berorientasi pada pendidikan akademis, tetapi kepada pendidikan dan pelatihan sehingga peserta didik memiliki ketrampilan yang sesuai dengan program atau bidang ketrampilan yang menjadi ciri atau karakteristik setiap lembaga kejuruan tersebut.

---

<sup>13</sup> Leo Agustono, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya*, Bandung, Alfa Beta, 2016. Hal. 28

Adapun Kerjasama yang diselenggarakan oleh madrasah dengan dunia internal atau eksternal (DU/DI), antara lain:<sup>14</sup>

**a. Pola Kerjasama Program Permagangan /PKL/ Prakerin**

Secara umum pelaksanaan program praktik kerja industri ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dibidang teknologi, penyesuaian diri dengan iklim dunia kerja yang sebenarnya. Setelah peserta didik melaksanakan program praktik kerja industri diharapkan memperoleh pengalaman yang mencakup tinjauan tentang perusahaan, kegiatan-kegiatan praktik yang berhubungan langsung dengan teknologi, mempersiapkan diri untuk mampu belajar dan bekerja secara mandiri, bekerja dalam suatu tim dan mengembangkan potensi serta keahlian sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Penyelenggaraan praktik kerja industri secara umum bertujuan untuk menjawab tantangan industri, secara rinci praktik kerja industri bertujuan<sup>15</sup> : (1) Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian professional, yaitu tenaga kerja yang memiliki tingkat kemampuan kompetensi, dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja (2) Meningkatkan dan memperkokoh keterkaitan dan kesepadanan antara pembelajaran kejuruan dan dunia kerja (3) Meningkatkan efisiensi proses pembelajaran (4) Pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan. Praktik kerja industri juga mensyaratkan adanya institusi lain sehingga terdapat kerja sama dan kesepakatan antara institusi pembelajaran (MAN) dan institusi lain tersebut (industri/perusahaan atau institusi lain yang berhubungan dengan lapangan kerja) yang memiliki sumber daya untuk mengembangkan keahlian kejuruan untuk bersama-sama menyelenggarakan pembelajaran keahlian kejuruan. Institusi lain itulah yang disebut dengan institusi pasangan, yaitu institusi yang mengikatkan diri bekerjasama dengan lembaga pendidikan kejuruan.<sup>16</sup>

**b. Pola Kerjasama Program Pelatihan**

---

<sup>14</sup> Yulianto dan Budi Sutrisno, "Pengelolaan Kerjasama Sekolah dengan Dunia Usaha/Dunia Industri" dalam Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol. 24 No. 1, Juni 2014.

<sup>15</sup> Indra Djati Sidi, Menuju Masyarakat Belajar - Menggagas Paradigma Baru Pendidikan (Jakarta: Paramadina, 2001), 128

<sup>16</sup> Ibid., 129

Pelatihan menurut Mangkuprawira adalah sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu serta sikap agar karyawan semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawab dengan semakin baik, sesuai dengan standar.<sup>17</sup>

Dengan mengacu pada inti dari prakerin, ini berarti sebagai kombinasi belajar dan praktik yang sesungguhnya di dunia usaha dan dunia industri. Madrasah memberikan teori dan pelatihan dalam membantu praktik, sedangkan praktik yang sebenarnya dilaksanakan DUDI. Sebelum melakukan praktik beberapa hal yang perlu disampaikan kepada peserta didik.

**c. Pola Kerjasama Program Produksi (Produk Inovatif)**

Pola kerjasama dalam bidang produksi adalah suatu upaya dalam implementasi kurikulum, dengan metoda Production Base Education (PBE), dengan harapan untuk lebih mempertajam kompetensi yang didapatkan dari para peserta didik, hal ini bisa dilakukan apabila set-up peralatan dan sarana lab. Dan bengkel memadai untuk melakukan kegiatan produksi disamping tuntutan kompetensi para pengajar yang paling tidak setara dengan para supervisor industri, baik secara hard skill atau pun soft skill, pola ini lah nanti yang bisa disebut dengan *Teaching Factory*, dan ini bisa berjalan dengan efektif apabila pihak sekolah mampu meyakinkan industri disekitarnya untuk menjadi mitra dalam kegiatan produksi dan sekaligus menjadi vendor dari industri disekitarnya. Proses pelaksanaan akan ditangani secara professional oleh unit pelaksana teknis produksi dan training dibawah bidang kerjasama dan pelayanan Industri disetiap MAN penyelenggara program pendidikan keterampilan.

**d. Pola Kerjasama Program Penyaluran Lulusan**

Keterserapan lulusan MAN Penyelenggara program pendidikan keterampilan di dunia kerja dapat diartikan sebagai tingkat atau persentase keberhasilan lulusan MAN Penyelenggara program pendidikan keterampilan untuk memasuki dunia kerja, dalam hal ini memasuki dunia kerja sesuai dengan kompetensi yang telah didapatkan di bangku MAN. Lulusan MAN Penyelenggara program pendidikan keterampilan diharapkan mampu terserap langsung dalam dunia kerja, karena

---

<sup>17</sup> S. Mangkuprawira, Manajemen Sumber Daya Strategik (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002), 135

salah satu indikator keberhasilan suatu MAN Penyelenggara program pendidikan keterampilan adalah banyaknya jumlah lulusan yang dapat terserap di dunia kerja. Seorang lulusan MAN Penyelenggara program pendidikan keterampilan sebagai calon tenaga yang kompeten, akan memiliki kesempatan dan kemampuan agar mampu terserap ke dalam dunia kerja. Lulusan MAN Penyelenggara program pendidikan keterampilan sesuai dengan sasaran pola penyelenggaraan kecakapan hidup, diharapkan dapat mencapai keberhasilan. Keberhasilan lulusan tersebut ditinjau dari<sup>18</sup>: (1) lulusan bekerja sesuai dengan bidang keahlinya. (2) tenggang waktu lulusan mendapatkan kerja setelah lulus maksimal satu tahun. (3) keterserapan lulusan dalam periode dua tahun setelah lulus minimal 75%. (4) jumlah lulusan yang mampu menciptakan lapangan kerja 5%.

Berdasarkan landasan di atas, dapat diuraikan bahwa lulusan MAN Penyelenggara program pendidikan keterampilan diharapkan memperoleh jenis pekerjaan yang memiliki kriteria pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang telah diperoleh di bangku MAN. Mengingat tujuan MAN Penyelenggara program pendidikan keterampilan adalah menciptakan lulusan siap kerja, maka dalam proses keterserapan lulusan ke dunia kerja diharapkan tidak membutuhkan waktu tunggu yang lama dan proses penyalurannya sudah dapat dilakukan dengan baik, sehingga lulusan tidak akan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan atau terserap ke dalam dunia kerja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator keterserapan dalam dunia kerja terdiri dari jumlah lulusan yang terserap dalam dunia kerja, jenis pekerjaan, waktu tunggu, proses mendapatkan pekerjaan, dan proses penyaluran lulusan. Dengan adanya pola kerjasama Program Penyaluran lulusan adalah ujung tombak dari seluruh program, karena inilah yang akan menjadi tolak ukur dari keberhasilan dalam proses akhir dari kegiatan pembelajaran dengan harapan bahwa semua output menjadi outcome, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan kerjasama industri kemitraan dalam proses recruitment lulusan, hal ini harus dilakukan dengan inisiatif dari pihak sekolah menyampaikan data dan kompetensi dari lulusan dan bisa memberikan jaminan bahwa lulusan yang akan

---

<sup>18</sup> Depdiknas, Pengembnagan Sistem dan Standart Pengelolaan SMK, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2003), 3

disalurkan memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai dengan standar kebutuhan industri, baik secara Knowledge Skills dan Attitude. Proses pelaksanaan akan ditangani secara professional oleh unit pelaksana teknis PKL dan Penyaluran, dibawah bidang kerjasama dan pelayanan industri disetiap MAN penyelenggara program pendidikan keterampilan.

Tujuan yang terpenting dari terjalinnya kerjasama antara sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri adalah untuk meningkatkan kompetensi para peserta didik yang berkualitas. Dengan ini, khususnya lembaga pendidikan kejuruan perlu bekerjasama dengan berbagai pihak seperti pada DUDI ataupun lembaga yang lainnya. Kerjasama harus dilakukan atas dasar saling menguntungkan dan harus mengidentifikasi ataupun menyesuaikan dengan kebutuhan kedua belah pihak agar bermanfaat atau mendapatkan sebuah keuntungan. Hal ini merujuk pada suatu konsep bahwa kerjasama antara sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri sangat diperlukan, yaitu: a) Mengusahakan kesesuaian (kesepadanan) antara rancangan program dengan berbagai ketrampilan-ketrampilan berproduksi yang telah diperlukan oleh DUDI; b) Menjadikan suatu kesempatan untuk pelatihan maupun praktik bagi para peserta didik, sehingga peserta didik secara nyata akan melakukan praktik pada dunia usaha dan dunia industri dengan kemampuan-kemampuan berproduksinya yang diperoleh dari proses belajar untuk memenuhi sebuah kebutuhan DUDI; c) Sebagai ajang untuk meningkatkan serta memantapkan para peserta didik dalam rekrutmen tenaga kerja baru dengan ketrampilan berproduksi yang telah dimilikinya.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Wahjosumijo, Kepemimpinan Kepala Sekolah – Tinjauan Teoritik Dan Permasalahannya. (Jakarta: Rajawali press, 2011), 199

## BAB IV KESIMPULAN

Berdasarkan uraian Tantangan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) percontohan dalam Mengembangkan Proram Pendidikan Keterampilan Berorientasi Masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tantangan mengimplementasikan kurikulum program pendidikan keterampilan pada MAN percontohan terbatasnya waktu dalam penyusunan jadwal pembelajaran, sarana penunjang pembelajaran masih belum lengkap,
2. Sumber Daya Manusia dalam mengembangkan program pendidikan keterampilan pada MAN percontohan di Kalimantan Selatan masih sangat terbatas, khususnya guru-guru

bidang keterampilan belum sepenuhnya sesuai dengan bidang keahliannya, hanya sebagai yang sesuai dengan bidangnya, dan masih tenaga honor/kontrak.

3. Kebijakan Pemerintah dalam megembangkan program pendidikan keterampilan pada MAN percontohan di Kalimantan Selatan masih belum ada kesenerjian antara pemerintah pusat, wilayah (kementerian Agama) dengan pemerintah daerah (Pemda) dalam mengembangkan program pendidikan keterampilan
4. Sikap dunia usaha dan dunia industri (masyarakat) dalam mengembangkan program pendidikan keterampilan pada MAN percontohan di Kalimantan Selatan. Masyarakat dan dunia usaha dan industry sangat mendukung dan senang dengan adanya hasil karya siswa/siswi MAN, akan tetapi hasil karya mereka masih belum maksimal dalam mengembangkan keterampilannya.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abuddin Nata. M. (2012) *Manajemen Pendidikan; Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta. Kencana.
- Ahid, N. (2009). *Problematika Madrasah Aliyah di Indonesia*. Jakarta, Kencana
- Alifuddin, M., (2012). *Reformasi Pendidikan: Strategi Inovatif Peningkatan Mutu Pendidikan* . Jakarta: Magna Scrip Publishing.

- Al-Jumbulati & Al-Tuwaanisi, (2002), *Perbandingan Pendidikan Islam*, terj. M. Arifin, Jakarta: Rineka Cipta
- Anwan, Moch Idochi. (2013). *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Pembiayaan*
- Anwar, (2004) *Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill Education)*, (Bandung: Alfabeta.
- Anwar, M. (2006) *Pendidikan Kecakapan Hidup (life Skill Education)*. Bandung. Alfabeta
- Arifin, (2000). *Ilmu Pendidikan Islam, Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Indisipliner*, (Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Arifin, I. 1996. *Penilaian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan*, Malang: Kalimasada Press.
- Assegaf, R, A. (2005). *Pendidikan Nasional; Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Proklamasi ke Reformasi*. Yogyakarta: Kurnia Kalam
- Azhar, C. (2017) *Manajemen Pengembangan Pendidikan Islam Perspektif Al-Qur'an*. *Jurnal Tarjih*, 14 (01) 18
- Bagnall, N. F. (2006) *The Balance Between Vocational Educational Secondary and General Secondary schooling in Finace and Australia*. *Jurnal : Comparative Education*. Oxford: Nov. Vol. 36, Iss.4; pg. 459, 17 pgs.
- Bawani, I. 1987. *Segi-Segi Pendidikan Islam Indonesia*, Surabaya, Al-Ikhlas
- Calhoun, C.C. & Finc, A.V. (1982) *Vocasional education, concept and operations*: Belmont, California: wadsworth, Inc
- Clarke, M. (1999). Management development a new rol in social change? *Mnagement Decision*, 37 (10), 767-777. <https://doi.org/10.1108/00251749910302863>
- Daldiri, A., (2018). Entrepreneurial leadership for excellent technical and vocational education institutions. *Word Transsaction on Engenering and Technology Education*, 16 (04), 7.
- Damsar. (2010). *Pengantar Sosiologi Pendidikan*. Jakarta : Kencana
- Deissinger, T. (2008). The German dual system-A model for Eoropa? *Jurnal: Eucation & Training*. London: Vo.39,Iss.8/9
- Deissinger, Thomas. (2000) *Vocational Training in Small firms in Germany: The contribution of the sector*. *Jurnal Eucation & Training*. London: Vo.43,Iss.8/9,pg426,11 pgs
- Departemen Agama RI, *Pedoman Umum Program Keterampilan*, (Jakarta: Dirjen Bagais Depag RI, 2003),

- Depdiknas, (2003) *Pengembangan Sistem dan Standart Pengelolaan SMK*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional,
- Diknas. (2003). *Reposisi Pendidikan Kejuruan menjelang 2020*. Jakarta; Dikmenjur, Diknas
- Eduardo, Tome (2008) *The Evaluation of Vocational Training: A comparative analysis*, *Jurnal of European Industrial Training*. Bradford. Vol.25, Iss. 6/7; pg. 380, 9 pgs
- Fadjar, A M. 2006. *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, Bandung : Mizan
- Fatah. N. (2000). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosdakarya,
- Finch, C.R. & Crunkilton, J.R. (2004). *Curriculum development in vocational and technical education* ed. USA: Allyn & Bacon.
- Grubb, W.N. (2005) *The new vocationalism: What it is, what it could be*. *Journal: Phi Delta Kappan*. Bloomington: Apr. Vol. 77, Iss. 8
- Hamalik Oemar. (2010). *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, Bandung: PT. Remaja Rosdakrya.
- Heidegger, G. (2007), *The social shaping of work and technology as a guideline for vocational education and training*. *Journal of European Industrial Training*. Bradford; Vol. 21, Iss. 6/7
- Heikkinen, Anja. (2003) *Educational Education or training? Changes as a guideline for vocational education and training*. *Journal of European Industrial Training*. Bradford: Vo. 21, Iss.Iss.
- Henderson. Roger. & Robertson, Martyn. (2007). *Who wants to be an entrepreneur? Young adult attitudes to entrepreneurship as a career*. *Jurnal: Education & Training*. London: Vo. 41,Iss. 4/5; pg. 236, 10 pgs
- Humpherys, A. Post, T. & Ellis, A. (2006). *Interdisciplinary method: A thematic approach*. Santa Mobicca, CA: Goodyear Publishing Company.
- Husaini Usman,( 2014) *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,
- Husba, M. 2005. *Administrasi Pendidikan: Aplikasi Fungsi-Fungsi Manajemen pada Lembaga Pendidikan Formal*. Makasar: pustaka Refleksi.
- Ilyasin, M. & Nurhayati, N. (2012) *Manajemen Pendidikan Islam; Konstruksi Teoritis dan Praktis*. Aditya Media Pub.
- Indra Djati Sidi, (2001) *Menuju Masyarakat Belajar - Menggagas Paradigma Baru Pendidikan* (Jakarta: Paramadina,

- Kay, Carol., Fonda, Nickie., Hoyes, Chris. (2004). Growing an Innovative Workforce: A new approach to education and training. Journal: *Education & Training*. London: Vol. 40, Isn. 5/6; pg 267, 9 pgs
- Kementerian Agama RI, (2007) *Al-Qur'an Terjemah*, Angkasa, Bandung
- Kementerian Agama, (2014) *Pedoman Penyelenggaraan Program Keterampilan Di Madrasah Allyah*, Dirjen Bimbaga Islam.
- Khaerudin, dkk. (2007) *Kurikulum Tingkat Sattuan Pendidikan; Konsep dan Implementasinya di Madrasah*. Jogjakarta: Pilar Media
- Lubis, D.R. (2014). Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Manajemen Berbasis Kompetensi Dalam Mencapai Tujuan Madrasah. *Forum Paedagogik*, 06.(02), 15.
- Machali & Mustofa (ed.). (2008) *Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi*, Yogyakarta; Ar-Ruzz Media
- Mastuhu. 2006). *Memberdayakan Ssitem Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos
- Miles, M.B. & Hubberman, A.M. 2004. *Qualitavte Data Analysis*; A Suarce Book New York Method Baferly Hill; Sage Publication
- Mulyasa, E.(2013). *Manajemen Dan Kepemimpinan Kepala Madrasah* . Jakarta: Bumi Aksara.
- Munich, D. Svijner, J., & Terrel, K. (1999). Worker-firm Matching and unemployment in transition to a marker economy: (Why are the Czechs more successful than others?)
- Nanang Fattah, (2011). *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya,
- Noto Widodo. (2005). *Penyelenggaraan Program Keterampilan di Madrasah Aliyah Provinsi Jawa Tengah* Tesis tidak diterbitkan PPs UNY
- Paryono. (2005) *Workforce education and development during economic crisis: a case study in Indonesia*, Thesis, The Graduate School, College of Education, The Pannsylvania State University.  
*Pendidikan* . Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Pollit, D.. (2000). Making Education and Training Work; Case Stuies of Good Prakte Education+ Training, 42 (7), 403-426. <https://doi.org/10.1108/EUM0000000005373>
- Purcell, Jeanette. (2007). National Vocational Qualication and competence-based assessment for technicians-from sound principles to dogma. Journal : *Education & Training*. London; Vol. 43, Iss. 1; pg. 30, 10 pgs
- Qomar, M. (2007) *Manajemen Pendidikan Islam*. Jakarta: Erlangga
- S. Mangkuprawira, (2002) *Manajemen Sumber Daya Strategik* (Jakarta, Ghalia Indonesia,
- Sanjaya, Wina (2016). *Strategi Pembelajaran: Berorientasi Standar Proses Pendidikan Kencana*

- Smith, E. (2005). How competency-based training has changed the role of teacher in the vocational education and training sector in Australia, *Asia Pacific Journal of Teacher Education*. Abingdon; Vol. 27. Iss 1.; pg. 61, 15 pgs
- Sugiyono, (2007) *Metode Penelitian Pendekatan, kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung ; Alfabeta
- Sukmadinata, Nana Syaodih,. N. (2010). *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya,
- Ulfatin, N., (2015). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Penelitian Pendidikan: Teori dan Praktek*. Malang: Media Nusantara Creative
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2013 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Wahjosumijo,( 2011) *Kepemimpinan Kepala Sekolah – Tinjauan Teoritik Dan Permasalahannya*. (Jakarta: Rajawali press,
- Wheelahan, Leesa. & Carter. Richard. (2001). Nasional training packages: A new curriculum framework for vocational education and training in Australia. *Jurnal : Education & Training*. London: Vol. 43, Iss. 6; pg. 303, 14 pgs
- Yin, R.K. (2006). *Case Study Research Design and Methods*. Terjemahan Mudzakir, M.D. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Yulianto dan Budi Sutrisno, “Pengelolaan Kerjasama Sekolah dengan Dunia Usaha/Dunia Industri” dalam *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol. 24 No. 1, Juni 2014.